



## Opini Hukum

Pencarian



### Berita Terkini >>

- Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi
- Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah
- Timkamnas Prabowo – Hatta Ajak Pendukung Bersikap Optimis Sambut Kemenangan
- PBB: Gaza Kini Berada di Ujung Tanduk
- Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat
- Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey

### Sakit Jiwa

## Fenomenologi Kegilaan; Sakit Jiwakah Kita?

Saturday 08 Mar 2014 19:34:28



Kamaruddin Hasan, Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal Ketua Development for Research and Empowerment (DeRE-Indonesia).(Foto: Istimewa)

Oleh: Kamaruddin Hasan

“KEMATIAN kini tak lebih dari ... nilai tukar” Baudrillard. Pernah ditulis oleh kawan saya Reza Alexander tahun 2007, tentang fenomenologi horor dan kekerasan massa. Saat itu saya masih di pasca UI Jakarta, dan salah satu tulisannya pula etos pergerakan menguat dalam diri sebagai mahasiswa pascasarjana, menganalisa kembali kemana arah reformasi bangsa dan negara ini. Reza mengulas dengan baik situasi dan kondisi bangsa negara saat itu dan kepada Reza Alexander, saya minta izin, untuk mengutip beberapa tulisannya.

Menapaki serta menghayati berbagai tindak kekerasan dan kejahatan mungkin bisa membuat kita sejenak berkaca dan bertanya, sakit jiwakah kita? Jawaban atas pertanyaan itu sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai konsep sakit jiwa. Jika sakit jiwa dimaknai sebagai kondisi manusia yang didikte oleh hasrat, emosi dan amarahnya, maka pertanyaan itu akan mengundang jawaban yang positif. Namun dalam arti tertentu, berbagai bentuk peristiwa horor negatif destruktif yang terjadi di masyarakat

### Berita Terkini >>

## Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi



JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti opini publik, Agung Prihatna mengungkap beberapa fenomena keanehan

## Jokowi Hendak Minta Bantuan, Yusril Tolak Mentah-mentah



JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro PBB Prof Yusril Ihza Mahendera berpegang teguh terhadap

## Timkamnas Prabowo – Hatta Ajak Pendukung Bersikap Optimis Sambut Kemenangan

kita dapat dilihat sebagai suatu gejala kegilaan institusional yang tengah menjangkiti dasar-dasar mental bangsa negara ini.

Foucault menulis, gangguan pada pikiran adalah akibat dari penyerahan buta kita pada hasrat-hasrat kita sendiri, ketidakmampuan mengontrol dan menjinakkan hawa nafsu kita dan merupakan kondisi menuju kegilaan. Kegilaan, dimana didalamnya jiwa didikte oleh hasrat, berupaya keras mencari penyaluran untuk hasrat-hasrat yang tidak tertahankan tersebut. Penyaluran hasrat yang berlebihan itu, di tataran sosial, dapat dilihat dalam segala bentuk kompromi hukum, pemutarbalikan hukum dan fakta, sehingga menciptakan lubang bagi lahirnya kejahatan. Dalam kondisi kegilaan, manusia terpenjara di dalam fragmen-fragmen fantasi, imajinasi, dan sesuatu yang tidak nyata.

Kegilaan muncul ketika manusia terobsesi dengan kebanggaan, citra, dan prestise yang bersifat semu, sehingga yang terbentuk adalah kesadaran akan realitas yang bersifat semu, tidak nyata. Sehingga dalam kegilaan itu lanjut Foucault, orang menipu dirinya sendiri. Orang gila dituntun oleh kepalsuan citra maka ia membenarkan dirinya di dalam lingkaran kesadaran palsu. Kegilaan adalah kondisi dimana hasrat dibawa menuju kebutaan. Nafsu untuk berkuasa yang tidak tertahankan lagi ditambah dengan kebutaan akan mengubah paradigma pembangunan menjadi paradigma kekerasan.

Di dalam kancah perpolitikan, paradigma kekerasan dapat diimbangi dan disembunyikan dengan berbagai bentuk topeng dan kosmetik politis, yang akhirnya menghidangkan kesemuan dan kepalsuan. Sifat agresif destruktif realitas perpolitikan, seperti pengkhianatan, pembantaian, penjarahan, penggusuran ilegal, intimidasi, teror dibungkus dengan senyum dan dengan hati sedingin gunung es. Di titik ini, wajah-wajah kebencian masyarakat bersatu dengan wajah kepuasan mayoritas yang berdiam diri.

Bagaimana bentuk kejahatan, korupsi, kekerasan, penipuan akhir-akhir ini, bahkan kematian sungguh menghantam dengan keras sendi-sendi moral bangsa negara. Dehumanisasi dan irasionalisasi tampak menggerogoti tubuh perpolitikan dan ekonomi dengan skala giant, yang menoreh luka batin kolektif dalam kesadaran mental rakyat secara mendalam. Teror, berbagai drama kekerasan, pembantaian, pembunuhan lewat sambung menyambung tanpa ada solusi yang signifikan, dan tanpa kemampuan untuk membangkitkan kesadaran moral apa pun. Pelenyapan harta benda dan jiwa manusia,



JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilihan Presiden telah selesai dilaksanakan pada 9 Juli 2014 kemarin, berb

## PBB: Gaza Kini Berada di Ujung Tanduk



PALESTINA, Berita HUKUM - Situasi di Jalur Gaza berada di ujung tanduk, kata Sekretaris Jenderal PBB

## Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat



JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan sikap tetap mendukung

## Pemerintah Perlu Atur Secara Tegas Lembaga Survey

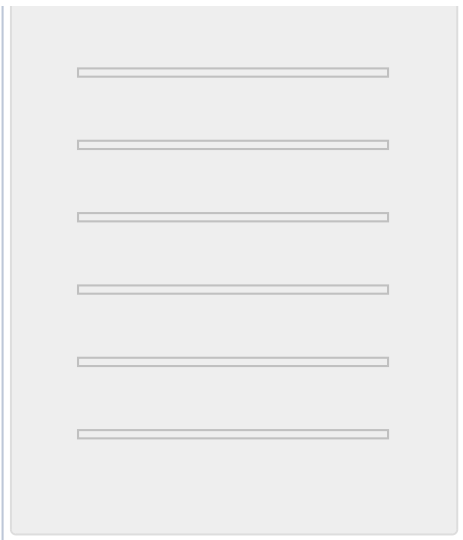


JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Tantony Yahya meminta kepada

## Berita Utama >

- Fadli Zon: Hitung Cepat Bukan Berarti Hitung Tepat
- KPU Jelaskan Perkembangan Pemungutan Suara Pilpres 2014
- Hakikatnya Pilpres 2014
- Tim Jokowi-JK Tertangkap Lakukan Serangan Fajar
- Jarno Wakapolda Metro Jaya Pantau Langsung Keamanan TPS VIP
- Presiden PKS Anis Matta: Kobarkan Semangat Indonesia!!

## SPONSOR & PARTNERS



tetap berlanjut tanpa ada sesuatu pun yang mampu memutus rantainya.

Ketidakterdayaan aparaturnegara, mandulnya penegakan hukum, reaksi masyarakat yang sudah acuh tak acuh ketika bertatapan dengan euforia kekerasan dan horor yang seakan-akan tak habis-habisnya. Di titik inilah, tilikan filosofis tentang makna dari kekerasan tentu akan mampu membawa kita untuk menggali makna dan hakekat dari perubahan ini secara lebih mendalam.

Destruktif agresif, menjamurnya kekuatan horor

Secara intuitif, kita dapat merasakan adanya kekuatan tidak terlihat dan aktor-aktor kekerasan tanpa nama dibalik semua fenomena kekerasan kolektif yang telah meracuni sendi mental moral bangsa negara ini. Kekuatan horor ini belum dapat, dan mungkin tidak akan dapat, dikonseptualisasikan secara utuh, koheren serta sistematis, tetapi dapat dirasakan dan dicium kehadirannya. Ia telah menularkan berjuta kekerasan, kebrutalan, kecemasan, ketakutan, keputusan, berjuta teror, intimidasi, ancaman, kepanikan, kegilaan, pembunuhan, walaupun tetap bermain tersembunyi di balik punggung rakyat.

Bangsa negara ini berpuluh-puluh tahun hidup di bawah kungkungan berbagai kekuatan horor tersebut. Walaupun begitu, kekuatan-kekuatan horor tersebut masih diam tersembunyi, tanpa pernah menampakkan dirinya secara nyata, yang dapat dipaparkan adalah gejala-gejala maupun sindrom-sindrom dari berbagai kekuatan horor itu, bahwa kekuatan horor tersebut detik ini sedang menciptakan dan mengkondisikan kebrutalan di berbagai lapisan rakyat. Ia juga mampu mengerti dan memahami perasaan, hasrat, emosi, fantasi, serta segala mimpi rakyat yang kemudian memanipulasi emosi kolektif rakyat tersebut demi tujuan-tujuan dominasi dan penguasaan. Dengan menerapkan taktik strategis khas Machiavellian, kekuatan horor tersebut mehalalkan teror, intimidasi, penyiksaan pembunuhan demi merealisasikan tujuan-tujuannya.

Proyek destruktif agresif mencapai tujuan dominasi itu didukung dengan finansial yang sangat sehat, dan sumber daya manusia yang sangat profesional dalam menjalankan strategi agresif destruktif.

Kekerasan yang dituai dari kekuatan horor tersebut bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan simbolik dan kekerasan yang menyerang psikis manusia. Kebrutalan tidak hanya menyentuh arena fisik dalam bentuk lahimya senjata-senjata pemusnah massal baru, melainkan juga kebrutalan tanda. Aspek brutal dalam bentuk tindakan penjarahan juga tidak hanya menghantam penjarahan harta benda, melainkan juga penjarahan yang bersifat spiritual. Tindakan agresif destruktif tidak hanya dalam bentuk aksi terorisme, melainkan juga agresivitas ekonomi. Aspek kegilaan juga tidak hanya meyentuh kegilaan mental, tetapi juga kegilaan akan kekuasaan. Tak bisa dipungkiri lagi, realitas telah menyediakan dunia yang penuh dengan horor di depan mata.

Kejahatan telah berubah wujudnya menjadi suatu aksi terorganisir secara rapi, serta dikembangkan dengan tingkat kompleksitas, baik itu teknologi, manajemen, dan politik, yang terus menerus meningkat. Jika menoleh ke dalam ranah perkembangan kesadaran masyarakat, kita akan melihat perubahan sosial yang cukup esktrm. "Dari kondisi hanyut di dalam ekstasi kemewahan," mengutip bahasa Piliang, "menuju ekstrem lain berupa ekstrasi pembunuhan, kriminalitas, pembakaran". Dari gejala ini, kita bisa

## Pengesahan RUU MD3 Diwarnai WO dan Hujan Interupsi



Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) akhirnya di

## Advokat Gugat Ketentuan Wajib Sumpah di Pengadilan Tinggi



JAKARTA, Berita HUKUM - Lagi-lagi Undang-Undang (UU) Advokat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ka

menyimpulkan bahwa bangsa negara telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, yakni akal sehat dan kontrol diri. Kita tenggelam di dalam dua ekstrem pada momen yang sama, yakni ekstremitas kemewahan di satu sisi, dan ekstremitas kekerasan di sisi lain, tanpa bisa mengendalikan diri.

Dalam banyak kasus kegilaan, kita dapat melihat adanya aspek-aspek eksternal yang merangsang berkembangnya kekerasan tersebut, seperti ketidakadilan, kesenjangan, kesewenang-wenangan, dan sebagainya. Konflik merupakan aspek eksternal yang paling memungkinkan sebagai penyulut api tindakan kekerasan massal. Yang harus menjadi fokus kita dibalik semua peristiwa negatif bersimbah darah ini adalah penciptaan konflik yang diusung oleh kekuatan-kekuatan horor tertentu di tangan para penguasa, baik itu politik maupun ekonomi.

### Hipermoralitas

Berkembangnya irasionalitas dan kegilaan di tataran kolektif kesadaran rakyat juga merubah disposisi moral yang telah ada di dalamnya. Fakta bahwa semakin kaburnya batas-batas moral tidaklah dapat dipungkiri lagi. Melihat fenomena ini, saya meminjam analisis dari George Bataille, menulis “berkembangnya suatu kondisi dimana ukuran-ukuran moralitas yang ada tidak dapat dipegang lagi, situasi yang berkembang telah melampaui batas-batas baik dan buruk, benar dan salah, indah dan jelek”. Ia menamakan kondisi ini sebagai hipermoralitas, yakni semakin kaburnya batas-batas antara yang baik dan buruk tersebut telah menyudutkan masyarakat ke arah krisis legitimasi moral. “Krisis legitimasi (moral)”.

Efek dari pencemaran tangan penguasa di dalam kancah nilai-nilai moral tradisional telah memicu gerakan pembebasan total dari nilai-nilai moralitas konvensional. Ketika aparat yang berwenang tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan hukum dan keadilan, rakyat lalu mencari celah untuk menciptakan keadilan dengan caranya sendiri. Sikap rakyat ini didorong oleh tendensi apatisme terhadap hukum.

Moralitas yang mengambang ini adalah abjeksi moral, dimana individu atau masyarakat tenggelam di dalam jurang moralitas yang paling rendah, lenyapnya batas antara baik dan buruk. Mengambangnya nilai-nilai moralitas konvensional telah melahirkan apa yang disebut sebagai ambiguitas moral, yakni penghujatan yang didampingi dengan senyum, penjarahan dan penggusuran atas nama pembangunan, pembunuhan dan penyiksaan atas nama persatuan dan kesatuan bangsa, kejahatan yang dibungkus dengan embel-embel kepahlawanan dan sebagainya.

Abjeksi moral adalah suatu kondisi dimana hukum dan moralitas dimanipulasi, dipertainkan, diputarbalikan, serta dibelokan arahnya demi kepentingan kekuasaan. Gerak manipulatif penuh penipuan tersebut telah meremukkan kepercayaan rakyat yang sesungguhnya sangatlah tipis. Bentuk ketidakpercayaan kolektif rakyat atas pemerintahnya ini telah mencabut legitimasi pemerintah itu sendiri, yang dianggap telah mempermainkan moralitas.

Penentuan apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, dilakukan dengan menempuh permainan kata-kata, karena dianggap dapat menyembunyikan, menunda, mengambangkan, atau bahkan membelokan persoalan keadilan yang sesungguhnya

sangat mendesak. Misalnya penggunaan kalimat, “akan diusut tuntas,” “sedang dalam penyelidikan”, “sedang dikumpulkan bukti-bukti”, dan sebagainya “merupakan,” dalam bahasa Piliang, “suatu cara mengembangkan persoalan sampai pada suatu ketika persoalan tersebut dilupakan”.

Selain itu, pihak yang berwenang juga dicurigai bermain dengan aturan hukum yang telah sah dan disepakati bersama. Permainan tersebut bukan untuk mencari dan menemukan kebenaran serta keadilan, melainkan justru untuk menyembunyikan kadilan dan kebenaran, serta membuatnya tunduk di bawah kepentingan dominasi kekuasaan. Berada di dalam kondisi pengambangan moralitas dan hukum semacam itu, rakyat cenderung mencari pemecahan atas persoalan-persoalan keadilan dengan caranya sendiri.


Krisis legitimasi terhadap hukum dan tatanan pemerintah yang berlaku bermuara pada meluasnya bahasa-bahasa rakyat itu sendiri untuk mencari keadilan, yakni bahasa keadilan rakyat. Bahasa keadilan rakyat dapat berupa bahasa kekerasan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, penghancuran. Perasaan kolektif yang negatif dan emosi kolektif yang dipendam telah semakin memperpanas kondisi mental rakyat, sehingga muncul iklim kekerasan yang terus meningkat, seperti dendam kolektif, kekerasan, kemarahan, rasa tidak aman, kesenjangan sosial, keputusasaan, dan sebagainya.

Kemana bangsa negara ini melangkah?

Kekerasan dan kejahatan, tidak akan pernah dapat dilenyapkan yang dapat dilakukan adalah meminimalisir efek-efek destruktifnya, sehingga realitas negatif tersebut masih berada di dalam kontrol tatanan yang legitim. Sistem ekonomi dan politik yang berlaku di dalam rakyat juga akan sangat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan prosentase kekerasan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide-ide rakyat tanpa kekerasan, perlu mengupayakan pendekatan yang menyeluruh terhadap budaya maupun mentalitas kekerasan yang telah terlanjur menjangkiti benak rakyat. Dengan kata lain, sebuah fenomena tindak kekerasan harus dilihat dalam struktur tindak kekerasan yang lebih luas, seperti kekerasan politik, kekerasan ekonomi, kekerasan kultural, kekerasan media, dan sebagainya. Harus dibangun sebuah sistem politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum yang dapat meminimalisir penggunaan, kalau perlu menyingkirkan, kekerasan. Jika budaya kekerasan di dalam sistem politik dan ekonomi masih dilestarikan, yang terjadi adalah merajalelanya mentalitas kekerasan tersebut di dalam setiap dimensi kehidupan mental dan fisik bangsa negara.

Akan tetapi, mulailah dari apa yang kita sentuh sehari-hari. Segala sesuatu yang besar berawal dari langkah kecil, begitu pula dengan upaya-upaya pembasmian kekerasan.(kh/bhc/sya)

  
Comment using...



**Sabiran Gibran** · ★ Top Commenter

Membaca supaya jangan ikutan,,,,,,,,,,,,,,,,

Reply · Like · 3 · March 10 at 6:57am



**Sabiran Gibran** · ★ Top Commenter

Membaca tulisan Pak **Kamaruddin Hasan Kuya** memang inilah realitas acehgh saat ini. salut tulisan ini.

cc Safar Manaf IV **Arhas Peudada** **Zulfadlie Kawom** **Alfarisi Kluetku** **Murizal Hamzah** **Teuku Murdani Reza Idria**

Reply · Like · 1 · March 13 at 7:55am



**Muhammad Nasir Age** · Jurnalis lokal at Harian Waspada Medan

Cocok..., bit keuh takalen le that 'ambulan' lawet nyoe di Aceh...

Reply · Like · 2 · March 10 at 8:52pm



**Qia Hafis** · ★ Top Commenter

inilah sebuah realita di aceh sebuah tangan besi masuk dlm sistem politik maka bebas meukupruk2 sayep,, Awak Mat palee Peh Parang Bak tempen yu Mat Pulpen Lam Kantoe..mantan Kombatan sebagai garis depan untuk pegang senjata yu duk bak meja biokrasi Ilme meu sipadeuh euh tan lam pemerintahan kiban nak bangun pemerintahan yg geut dan kemakmuran rakyat droe jih mantoeng pih mantoeng mumang gon bee mesiu..haaaaaaaaaaaaaa Hukum Rimba Turun Ke Kota haaaaaaaaaaaaa

Reply · Like · 1 · March 14 at 6:53am

Facebook social plugin

SHARE ...



## Berita Terkait Sakit Jiwa



Fenomenologi Kegilaan; Sakit Jiwakah Kita?



Pembantai Oslo Dinyatakan Sakit Jiwa



Traffic Rank  
beritahukum.com

394,159

Powered by Alexa

[Beranda](#) | [Tentang Kami](#) | [Hubungi](#) | [Redaksi](#) | [Partner](#) | [Karir](#) | [Info iklan](#) | [Disclaimer](#) | [Mobile](#)



Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com

**KPU RI: Penggunaan KTP/KK/Paspor/ identitas kependudukan lainnya serendah2nya di keluarkan oleh kelu**  
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: [info@beritahukum.com](mailto:info@beritahukum.com)